

KEBEBASAN MEDIA MASSA DAN TANTANGAN INFODEMIK DI ERA DIGITAL: DINAMIKA, POLARISASI, DAN IMPLIKASI REGULASI

Nia Rahmi¹

*niahmi868@gmail.com

¹Universitas Islam Negeri Mataram

*Corresponding Author

Abstrak

Perkembangan teknologi digital dan internet telah mengubah secara mendasar dinamika hubungan antara media massa dan masyarakat. Fenomena ini memperluas ruang kebebasan berekspresi, namun di sisi lain memicu tantangan baru berupa infodemik, penyebaran disinformasi, dan polarisasi informasi akibat algoritma media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh teknologi digital terhadap kebebasan media, mengidentifikasi tantangan media massa dalam menjaga integritas informasi, serta merumuskan peran regulasi pemerintah dan lembaga terkait dalam menciptakan ekosistem informasi yang seimbang. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan studi literatur dan analisis konten terhadap berbagai dokumen ilmiah dan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital mengubah posisi masyarakat dari sekadar konsumen menjadi produsen konten (*prosumer*), yang menuntut media tradisional beradaptasi melalui jurnalisme partisipatif, verifikasi ketat, dan kolaborasi dengan organisasi *fact-checking*. Regulasi yang fleksibel, penguatan literasi media masyarakat, serta pengawasan independen oleh lembaga seperti Dewan Pers dan KPI menjadi kunci penting. Kesimpulannya, kebebasan media massa di era digital harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial melalui sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat guna menjaga stabilitas demokrasi dan menciptakan ruang publik yang sehat.

Kata Kunci: Kebebasan Media, Era Digital dan Infodemik,

Abstract

The rapid advancement of digital technology and the internet has fundamentally transformed the dynamic relationship between mass media and society. While this phenomenon expands the space for freedom of expression, it simultaneously introduces new challenges, such as the infodemic, the spread of disinformation, and information polarization driven by social media algorithms. This study aims to analyze the impact of digital technology on media freedom, identify the challenges mass media face in maintaining information integrity, and outline the regulatory roles of the government and relevant institutions in fostering a balanced information ecosystem. A descriptive-analytic qualitative method was employed, utilizing a literature review and content analysis of various scientific documents and regulatory frameworks. The findings indicate that digital transformation has shifted society's role from passive consumers to content prosumers, requiring traditional media to adapt through participatory journalism, rigorous verification, and collaboration with fact-checking organizations. Flexible regulations, enhanced public media literacy, and independent oversight by institutions such as the Press Council and KPI are vital. In

conclusion, media freedom in the digital age must be balanced with social responsibility through synergy among the government, media, and the public to sustain democratic stability and ensure a healthy public sphere.

Keywords: *Media Freedom, Digital Era, and Infodemic.*

Pendahuluan

Pada era digital yang semakin berkembang pesat, kebebasan media massa mengalami transformasi yang signifikan dalam bentuk dan fungsinya. Kehadiran internet dan teknologi komunikasi modern telah membuka peluang bagi berbagai bentuk media baru, seperti blog, podcast, dan platform media sosial. Masyarakat kini tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen konten. Fenomena ini menyebabkan perubahan dalam dinamika hubungan antara media dan masyarakat, di mana kontrol informasi yang sebelumnya dimiliki oleh media tradisional kini semakin terdistribusi di tangan individu. Hal ini menimbulkan tantangan baru bagi konsep kebebasan media massa yang selama ini menjadi pilar demokrasi.

Salah satu dampak positif dari era digital adalah meningkatnya akses terhadap informasi. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses berita dari berbagai sumber tanpa batasan geografis. Namun, di sisi lain, akses yang mudah ini juga menyebabkan meluapnya informasi yang belum tentu terverifikasi kebenarannya. Fenomena ini melahirkan istilah "infodemik", di mana masyarakat dibanjiri dengan data dan informasi yang kadang sulit dibedakan antara yang valid dan yang palsu. Inilah tantangan bagi kebebasan media massa, di mana media harus berperan sebagai filter yang baik

untuk menampilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan¹.

Kebebasan media massa di era digital juga diwarnai dengan isu-isu privasi dan keamanan. Pengumpulan data pribadi oleh platform-platform digital sering kali menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Informasi pribadi yang dijadikan bahan untuk iklan dan propaganda dapat disalahgunakan, mengancam kebebasan individu. Di tengah perubahan ini, penting bagi masyarakat untuk memahami hak-hak mereka terkait privasi serta informasi yang mereka konsumsi. Pendidikan media menjadi krusial agar masyarakat dapat lebih kritis dalam menyaring informasi dan mengerti pentingnya sumber-sumber yang kredibel².

Menghadapi tantangan tersebut, peran media tradisional tidak lantas menghilang, tetapi justru harus beradaptasi dan berinovasi. Media massa konvensional memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang terpercaya dan edukatif bagi masyarakat. Media harus menjadi contoh dalam praktik jurnalisme yang baik, dengan memberikan laporan yang berimbang dan berintegritas. Dalam hal ini, kolaborasi antara media massa dan platform digital juga diperlukan untuk memastikan bahwa berita yang disebarluaskan memiliki kualitas yang tinggi serta bermanfaat bagi masyarakat.

¹ World Health Organization (WHO). (2020). *Managing the COVID-19 infodemic: Promoting healthy behaviours and mitigating the harm from misinformation and disinformation*. Diakses dari [https://www.who.int/news/item/23-09-2020-](https://www.who.int/news/item/23-09-2020-managing-the-covid-19-infodemic-promoting-healthy-behaviours-and-mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation)

[managing-the-covid-19-infodemic-promoting-healthy-behaviours-and-mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation](https://www.who.int/news/item/23-09-2020-managing-the-covid-19-infodemic-promoting-healthy-behaviours-and-mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation).

² Komnas HAM, *Laporan Pemantauan Hak atas Privasi di Era Digital 2022* (Jakarta: Komnas HAM, 2023), 15-18

Di sisi lain, regulasi terhadap media di era digital juga menjadi isu yang tidak kalah penting. Pemerintah dan lembaga terkait perlu merumuskan kebijakan yang mampu melindungi kebebasan berekspresi sambil menjaga agar informasi yang disebarkan bermanfaat dan tidak merugikan. Di banyak negara, tindakan sensor dan pemblokiran konten sering kali dilakukan dengan dalih keamanan nasional atau perlindungan masyarakat, namun hal ini sering kali disalahgunakan untuk menekan suara-suara yang kritis. Oleh karena itu, perdebatan tentang regulasi media di era digital perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk menciptakan keseimbangan yang baik antara kebebasan dan tanggung jawab.

Isu polarisasi informasi juga menjadi perhatian utama di era digital. Dengan algoritma yang digunakan oleh platform-platform media sosial, informasi sering kali dikurasi sedemikian rupa sehingga menciptakan "echo chamber" di mana pengguna hanya terpapar pada pandangan dan informasi yang sejalan dengan keyakinan mereka. Hal ini dapat memperdalam perpecahan sosial dan memengaruhi pemikiran kritis masyarakat. Media massa harus berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan cara mendiversifikasi konten yang disajikan dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam diskusi yang sehat dan konstruktif³.

Dalam konteks global, kebebasan media massa juga dihadapkan pada tantangan dari berbagai negara yang menerapkan kontrol ketat terhadap media. Beberapa pemerintah tidak segan-segan membungkam media dan jurnalis yang

kritis melalui ancaman, penangkapan, atau bahkan kekerasan. Situasi ini menuntut solidaritas dari komunitas internasional untuk mendukung kebebasan media di negara-negara yang terpinggirkan. Gerakan global seperti "Journalists Without Borders" berusaha untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong perlindungan terhadap hak-hak jurnalis di seluruh dunia.

Peran media massa dalam membangun kesadaran masyarakat di era digital juga tidak dapat diabaikan. Melalui kampanye dan advokasi, media dapat membantu mendorong agenda publik yang positif, baik dalam isu lingkungan, kesehatan, pendidikan, maupun hak asasi manusia. Media yang responsif dan proaktif dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih terinformasi dan berdaya. Disinilah media massa menunjukkan relevansinya sebagai lembaga yang tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial⁴.

Terakhir, untuk menghadapi kompleksitas kebebasan media massa di era digital, kolaborasi lintas sektor menjadi sangat penting. Pemerintah, media, akademisi, dan masyarakat sipil perlu bersinergi untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat. Pendidikan media juga perlu diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan untuk mempersiapkan generasi mendatang dalam menghadapi tantangan di dunia informasi yang semakin beragam dan kompleks. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kebebasan media massa dapat tumbuh harmonis dengan masyarakat di era digital, yang pada akhirnya akan

³ R. Willy Pramudya Srinowo dan Kurniawan, 'Algorithmic Curated Reality: Ruang Eko, Polarisasi, dan Tantangan Demokrasi di Media Sosial', *Jurnal Komunikasi Global*, Vol. 2, No. 1 (2023), 89-91

⁴ Puji Lestari dan Rina Kurniawati, 'Peran Media Massa dalam Kampanye Vaksinasi COVID-19: Membangun Kesadaran dan Kepercayaan Publik', *Jurnal Komunikasi Indonesia*, Vol. X, No. 2 (2022), 112-115

berkontribusi pada kemajuan demokrasi dan keadilan sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis konten. Data dikumpulkan dari berbagai sumber akademik dan institusional, meliputi jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, buku referensi media dan komunikasi, serta dokumen regulasi pemerintah dan lembaga media. Analisis konten dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait perkembangan teknologi digital, tantangan infodemik, fenomena polarisasi, serta kebijakan regulasi media di era digital.

Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam terhadap interaksi antara media massa, masyarakat, dan pemerintah dalam konteks kebebasan berekspresi dan penyebaran informasi. Hasil penelitian diolah secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran holistik serta rekomendasi kebijakan yang relevan dengan kebutuhan demokrasi dan keadilan sosial di era digital.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Dampak Teknologi Digital pada Hubungan Media dan Masyarakat

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah merevolusi cara komunikasi dan interaksi antara media massa dan masyarakat. Media massa tradisional, yang selama ini menjadi sumber utama informasi publik, harus beradaptasi dengan lingkungan digital yang semakin kompleks. Era digital telah menghadirkan tantangan dan peluang baru bagi media dalam menyampaikan informasi, sekaligus memperluas ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat dan

berbagi informasi. Transformasi ini secara substansial mengubah dinamika antara media dan audiensnya.

Salah satu dampak paling signifikan dari teknologi digital adalah peningkatan aksesibilitas terhadap informasi. Melalui internet, masyarakat kini dapat dengan mudah mengakses berbagai sumber informasi tanpa terkendala oleh batasan geografis dan waktu. Media sosial, blog, dan platform berbagi berita memungkinkan individu untuk menyampaikan pandangan mereka secara langsung, menciptakan ruang bagi kebebasan berekspresi yang lebih besar. Pada saat yang sama, masyarakat tidak lagi menjadi konsumen pasif; mereka berperan aktif sebagai produsen konten, sehingga memungkinkan keragaman suara dan perspektif dalam diskusi publik⁵.

Namun, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan serius, terutama terkait dengan kualitas informasi yang disampaikan. Munculnya hoaks, berita palsu, dan informasi yang menyesatkan di ruang digital dapat berpotensi merusak integritas informasi yang diterima masyarakat. Media massa sebagai lembaga penyampai informasi berkualitas harus bertindak lebih bertanggung jawab dengan menyaring dan memverifikasi konten yang mereka publikasikan. Dalam konteks ini, pendidikan literasi media menjadi sangat penting untuk membantu masyarakat mengidentifikasi informasi yang valid dan relevan, sehingga mereka dapat secara kritis menanggapi konten yang beredar.

Selain itu, hubungan antara media massa dan masyarakat menjadi lebih interaktif dan dinamis. Teknologi

⁵ Nurhayani Saragih, *Media dan Masyarakat: Dinamika Komunikasi di Era Digital* (Bandung: Refika Aditama, 2021), 3-5

digital memungkinkan audiens untuk memberikan umpan balik secara langsung terhadap konten yang disajikan, baik melalui komentar, berbagi, maupun reaksi di media sosial. Interaksi ini menciptakan kesempatan bagi media untuk lebih memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat, serta memperkuat ikatan antara jurnalis dan audiens. Namun, kerentanan terhadap ulasan negatif dan tekanan dari masyarakat juga dapat memengaruhi editorial dan kebijakan media dalam pelaporan berita.

Di sisi lain, meskipun teknologi digital memberikan kesempatan bagi kebebasan berekspresi, tantangan untuk menjaga kebebasan pers tetap ada. Di berbagai belahan dunia, jurnalis sering kali menghadapi intimidasi dan ancaman ketika meliput isu-isu sensitif. Dalam konteks ini, kebebasan berekspresi dapat terhambat oleh tekanan politik, sosial, atau ekonomi, yang pada akhirnya dapat membatasi keberagaman informasi yang disampaikan kepada publik. Penting bagi negara dan masyarakat sipil untuk melindungi jurnalis dan mendukung lingkungan yang kondusif bagi penyampaian informasi tanpa rasa takut akan pembalasan.

Serangkaian perubahan ini mengharuskan media massa untuk melakukan inovasi dalam cara mereka beroperasi. Untuk tetap relevan, banyak media beralih ke model bisnis digital dan memanfaatkan platform online untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Hal ini juga mendorong pengembangan bentuk-bentuk baru dari jurnalistik, seperti jurnalisme data dan jurnalisme partisipatif, yang melibatkan masyarakat dalam proses pengumpulan dan penyampaian

informasi. Pertukaran alat dan teknologi dalam pemberitaan memungkinkan penggiat media untuk menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan ekspektasi audiens⁶.

Oleh karena itu, pengaruh perkembangan teknologi digital terhadap hubungan antara media massa dan masyarakat adalah faktor yang kompleks dan saling terkait. Walaupun ada peluang untuk meningkatkan kebebasan berekspresi dan kualitas informasi, tantangan seperti penyebaran misinformasi dan ancaman terhadap kebebasan pers tetap harus diatasi. Oleh karena itu, kolaborasi antara media, masyarakat, dan pemerintah, serta pendidikan literasi media yang intensif, menjadi krusial untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat. Hanya dengan upaya bersama, potensi untuk mencapai komunikasi yang lebih baik dan lebih demokratik dapat direalisasikan.

2. Tantangan Media Massa Menghadapi Infodemik dan Polarisasi Informasi

Fenomena "infodemik" merujuk pada keadaan di mana terjadi ledakan informasi yang cepat dan melimpah, sering kali disertai dengan penyebaran disinformasi dan misinformasi. Di era digital, konsep ini mengacu pada tantangan yang dihadapi media massa dalam menjaga integritas dan kredibilitas informasi yang disampaikan kepada publik. Dengan adanya platform media sosial yang memungkinkan siapa saja untuk menjadi penyebar informasi, tantangan utama bagi media massa adalah memilah informasi yang tepat dan bertanggung jawab di tengah kebisingan dan kerumitan yang dihasilkan oleh infodemik. Hal ini

⁶ Riski Wahyudi, 'Transformasi Digital ANTARA: Strategi Bisnis dan Inovasi Konten di

Era Konvergensi', *Jurnal Penelitian Komunikasi*, Vol. 25, No. 1 (2023), 32-35

menuntut media untuk memiliki sistem verifikasi yang lebih ketat serta strategi editorial yang jelas⁷.

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kompleksitas dalam memverifikasi sumber informasi. Banyak berita dan konten yang beredar di media sosial tidak disertai dengan referensi atau bukti yang kuat, sehingga membuat tugas media massa semakin sulit. Proses verifikasi menjadi lebih mendesak dan penting, mengingat publik cenderung mengandalkan media untuk mendapatkan informasi yang akurat. Di sisi lain, perlambatan dalam proses verifikasi ini dapat menyebabkan media kehilangan relevansi di tengah arus informasi yang cepat, berpotensi mengalienasi audiens yang menginginkan berita terkini.

Di samping itu, polarisasi informasi merupakan tantangan besar lain yang harus dihadapi media massa. Dalam konteks ini, informasi sering kali dibagi dalam dua kutub ekstrem yang berbeda, menciptakan ruang diskursus yang terpolarisasi dan memicu ketegangan di antara kelompok masyarakat. Media massa, sebagai pilar dalam memperbaharui dan mendidik masyarakat, perlu waspada terhadap bagaimana pemberitaan mereka dapat berkontribusi terhadap polarisasi tersebut. Sikap yang tidak sensitif terhadap perbedaan gagasan dapat memperburuk kondisi sosial dan merusak kepercayaan publik terhadap media⁸.

Perluasan jangkauan influencer dan aktor di luar lembaga media tradisional juga memberikan tantangan signifikan. Banyak individu yang

menggunakan platform digital untuk menyebarluaskan pendapat dan informasi, yang kadang-kadang bersifat provokatif dan tidak berbasis fakta. Dalam keadaan seperti ini, media massa harus berperan aktif dalam membedakan antara informasi yang valid dan informasi yang menyesatkan. Namun, hal ini menuntut media untuk tidak hanya menjadi penyebar informasi, tetapi juga sebagai pendidik yang mampu memperhatikan literasi media masyarakat.

Salah satu strategi yang dapat diadopsi oleh media adalah penguatan kolaborasi dengan organisasi independen yang fokus pada fact-checking. Melalui kolaborasi ini, media dapat memanfaatkan sumber daya dan keahlian yang ada untuk memperkuat kualitas informasi yang disampaikan. Selain itu, melakukan audit berkala terhadap konten yang ditayangkan dapat membantu media dalam menilai apakah mereka telah memenuhi standar jurnalistik yang diharapkan. Hal ini sekaligus memperkuat posisi media sebagai otoritas informasi yang dapat dipercaya di tengah tantangan infodemik.

Selain itu, pengembangan literasi media yang efektif di kalangan masyarakat juga merupakan upaya krusial. Media massa perlu terlibat dalam meningkatkan kesadaran publik tentang cara mengenali informasi yang akurat dan menghindari konten yang menyesatkan. Program edukasi dan kampanye literasi media dapat membantu audiens memahami kompleksitas informasi di era digital serta memfasilitasi diskusi yang konstruktif. Hal ini tidak hanya akan

⁷ Yenni Palupi, *Literasi Media Digital: Tantangan dan Peluang di Era Society 5.0* (Jakarta: Kencana, 2021), 78-82

⁸ Ahmad Zuber dan Lusia Mumang, 'Urgensi Literasi Digital dalam Mencegah

Penyebaran Hoaks dan Menjaga Privasi di Media Sosial', *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 19, No. 1 (2021), 87-88

menciptakan audiens yang lebih kritis, tetapi juga dapat merangsang respons yang lebih baik terhadap informasi yang disebarkan oleh media⁹.

Akhirnya, meskipun tantangan-tantangan ini sangat signifikan, mereka juga menawarkan peluang bagi media massa untuk memperkuat integritas dan kredibilitas mereka. Dengan melakukan adaptasi yang tepat terhadap teknologi baru dan meningkatkan kapasitas untuk memverifikasi informasi, media dapat berperan sebagai katalisator dalam menciptakan masyarakat yang lebih terinformasi dan kritis. Dalam keadaan yang semakin kompleks ini, media massa yang mampu mengedepankan prinsip-prinsip jurnalistik yang solid bukan hanya berpotensi bertahan, tetapi juga dapat memimpin dalam membentuk lanskap informasi di era digital. Upaya kolektif dari semua pihak—media, masyarakat, dan lembaga pendidikan—sangat penting dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan bertanggung jawab.

3. Peran Pemerintah dan Lembaga dalam Regulasi Media: Menyeimbangkan Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Informasi

Pada era digital yang ditandai dengan pertumbuhan pesat informasi, peran pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan regulasi media menjadi semakin krusial. Konflik antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap informasi yang berpotensi merugikan adalah tantangan yang kompleks. Kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental yang diakui secara universal, tetapi jika

tidak diimbangi dengan regulasi yang tepat, dapat menyebabkan penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, dan konten berbahaya. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk menciptakan kerangka hukum yang dapat menjaga keseimbangan ini.

Regulasi yang dirumuskan harus mencakup aspek-aspek penting seperti definisi konten yang merugikan, sasaran regulasi terhadap platform media sosial, serta mekanisme respons terhadap konten yang melanggar ketentuan. Dalam konteks ini, pemerintah perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas media, akademisi, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa regulasi yang dibuat tidak hanya efektif tetapi juga inklusif. Keterlibatan berbagai pihak ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih holistik dan mempertimbangkan perspektif yang beragam, sehingga menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam pengaturan media¹⁰.

Selanjutnya, lembaga terkait seperti Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam implementasi regulasi media. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa media bertindak sesuai dengan kode etik dan regulasi yang telah ditetapkan. Pengawasan yang ketat terhadap konten yang disiarkan oleh media harus dilakukan untuk melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan serta mempromosikan tanggung jawab sosial dalam penyampaian informasi. Selain itu, lembaga-lembaga ini juga harus

⁹ Yenni Palupi, *Literasi Media Digital: Tantangan dan Peluang di Era Society 5.0* (Jakarta: Kencana, 2021), 145-148

¹⁰ Tim Pakar RUU ITE, Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021), 2-4.

memiliki mekanisme yang transparan untuk menangani pengaduan dari masyarakat terkait konten yang merugikan.

Di sisi lain, pemerintah harus berperan dalam meningkatkan literasi media di masyarakat agar individu mampu membedakan antara informasi yang benar dan tidak. Masyarakat yang teredukasi dengan baik akan lebih kritis dalam mengonsumsi informasi dan lebih sadar akan konsekuensi dari kebebasan berekspresi. Program-program pendidikan yang memfokuskan pada pengembangan kemampuan analisis dan penilaian terhadap informasi sangat diperlukan. Dengan demikian, masyarakat akan menjadi mitra dalam upaya menjaga integritas informasi di ruang publik dan dapat berkontribusi pada pengawasan konten media.

Dalam menghadapi dinamika teknologi yang terus berkembang, pemerintah juga harus memperbarui regulasi secara berkala. Perubahan ini harus berdasarkan penelitian yang mendalam dan evaluasi dampak dari regulasi yang telah ada. Sistem regulasi yang kaku dan tidak responsif terhadap perubahan teknologi dapat menghambat kebebasan berekspresi atau malah gagal dalam melindungi masyarakat dari informasi harmful. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang fleksibel dan adaptif dalam merumuskan serta menerapkan regulasi media.

Kolaborasi internasional juga penting dalam merumuskan regulasi yang sesuai dengan konteks global. Era digital memungkinkan penyebaran konten lintas batas, sehingga tantangan yang sama dapat dihadapi oleh negara-negara lain. Dengan berbagi

pengalaman dan praktik terbaik di tingkat global, pemerintah dapat menemukan solusi yang lebih efektif dalam mengelola isu kebebasan berekspresi dan perlindungan informasi. Kerja sama ini tidak hanya akan memperkuat regulasi nasional, tetapi juga mempromosikan tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan informasi yang aman dan sehat di seluruh dunia¹¹.

Terakhir, penting untuk diingat bahwa regulasi media harus tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi tanpa mengorbankan kebebasan individu. Regulasi yang berlebihan atau terlalu ketat dapat berpotensi mengekang kebebasan berekspresi, yang pada gilirannya berisiko menggerogoti fondasi demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait harus tetap mengevaluasi regulasi yang diterapkan agar seimbang, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keseimbangan ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebebasan berekspresi dapat terus berjalan bersama dengan perlindungan informasi yang berpotensi merugikan, sehingga menciptakan ruang publik yang sehat dan produktif dalam era digital yang kompleks ini.

Simpulan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah dinamika hubungan antara media massa dan masyarakat secara fundamental. Kehadiran media sosial dan platform digital membuka ruang luas bagi kebebasan berekspresi, namun di saat yang sama memicu tantangan serius berupa fenomena infodemik, disinformasi, dan polarisasi informasi.

¹¹ Dian Puspitasari, *Hukum dan Regulasi Media Digital: Tantangan dan Inovasi di Era Disrupsi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), 88-92

Kondisi ini menuntut media tradisional untuk terus beradaptasi dan menjaga integritas melalui verifikasi ketat serta jurnalisme yang bertanggung jawab.

Untuk menjaga kestabilan di ruang digital, pemerintah dan lembaga terkait (seperti Dewan Pers dan KPI) memegang peran vital dalam merumuskan dan mengimplementasikan regulasi media yang adaptif. Regulasi tersebut harus dirancang secara inklusif dan transparan agar mampu membendung ujaran kebencian serta konten berbahaya tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi maupun hak-hak demokratis individu.

Pada akhirnya, keberhasilan ekosistem informasi di era digital tidak hanya bergantung pada aturan hukum, melainkan juga pada penguatan literasi media masyarakat dan kolaborasi lintas sektor. Dengan sinergi antara pemerintah, lembaga media, dan publik yang kritis, kebebasan berekspresi dapat berjalan selaras dengan tanggung jawab sosial—menciptakan ruang publik yang sehat, produktif, dan demokratis.

Daftar Pustaka

- HAM, K. (2023). *Laporan Pemantauan Hak atas Privasi di Era Digital 2022*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Lestari, P., & Kurniawati, R. (2022). Peran media massa dalam kampanye vaksinasi COVID-19: Membangun kesadaran dan kepercayaan publik. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 10(2), 115–128.
- Palupi, Y. (2021). *Literasi media digital: Tantangan dan peluang di era Society 5.0*. Kencana.
- Puspitasari, D. (2022). *Hukum dan regulasi media digital: Tantangan dan inovasi di era disrupsi*. Rajawali Pers.
- Saragih, N. (2021). *Media dan masyarakat: Dinamika komunikasi di era digital*. Refika Aditama.
- Srinowo, R. W. P., & Kurniawan. (2023). Algorithmic curated reality: Ruang eko, polarisasi, dan tantangan demokrasi di media sosial. *Jurnal Komunikasi Global*, 2(1), 45–58.
- Tim Pakar RUU ITE. (2021). *Naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Wahyudi, R. (2023). Transformasi digital ANTARA: Strategi bisnis dan inovasi konten di era konvergensi. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 25(1), 15–28.
- World Health Organization. (2020, September 23). *Managing the COVID-19 infodemic: Promoting healthy behaviours and mitigating the harm from misinformation and disinformation*. World Health Organization. <https://www.who.int/news/item/23-09-2020-managing-the-covid-19-infodemic-promoting-healthy-behaviours-and-mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation>
- Zuber, A., & Mumang, L. (2021). Urgensi literasi digital dalam mencegah penyebaran hoaks dan menjaga privasi di media sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(1), 30–42.